

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN PERATIN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S1 Dalam ilmu Syari'ah**

Oleh:

**RAHARTI
NPM. 1721020264**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/ 2021 M

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN PERATIN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
(Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
S1 Dalam ilmu Syari'ah

Oleh:

RAHARTI

NPM. 1721020264

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS, M. Sos. I.

Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I.



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/ 2021 M

ABSTRAK

Masalah politik uang memang tidak asing dan tidak ada habisnya di dengar, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami terhadap aturan dan larangan politik uang tersebut. Sehingga masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat pekon dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih dan politik uang ini juga merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih. Seperti yang terjadi di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik politik uang dalam pemilihan peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Dan Untuk Mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat? (2) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Desa Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat? Dan apa perbedaan dan kesamaan hukum tersebut?. Dalam Penelitian ini penulis skripsi menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sementara data sekunder merupakan data penunjang atau data pelengkap dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan teknik deduktif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Di Pekon Pajar Agung termasuk ke dalam kategori *risywah*. *Risywah* merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam baik orang yang memberi atau yang menerima sama-sama tidak diperbolehkan di dalam syari'at. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-qur'an Q.S. Al-Baqarah: 2: 188. Sedangkan menurut Hukum Positif Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat merupakan suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3. Adapun persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap politik uang dalam pemilihan peratin. Persamaannya sama-sama menganggap politik uang dalam pemilu itu tidak diperbolehkan dan dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam sendiri perbuatan semacam itu dilarang oleh syari'at dan perbuatan politik uang termasuk kedalam kategori *risywah*. Sedangkan dari segi hukum positif sendiri memandang politik uang sebagai suatu tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Dari segi sanksi hukumannya dimana menurut hukum Islam yaitu memiliki ancaman atau hukuman yang di berikan oleh Allah SWT berupa ancaman di akhirat kelak, sedangkan dalam hukum positif hukumannya yaitu berupa hukuman dunia berupa penjara atau denda yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengatakan bahwa:

Nama : Raharti
Npm : 1721020264
Jurusan/Prodi : Siyasah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, makaanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 November 2021
Penulis



Raharti
1721020264



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**
Nama : **Raharti**
Npm : **1721020264**
Jurusan : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Susiadi AS, M. Sos. I

NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Muhammad Jayus, M.H.I

NIP. 198802092019031007

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)"** disusun oleh, Raharti, NPM : 1721020264, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis 25 November 2021.

Tim Penguji

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., MHI**

Sekretaris : **Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

Penguji I : **Marwin, SH.,MH**

Penguji II : **Dr. Susiadi AS, M.Sos.I**

Penguji III : **Muhammad Jayus , M.H.I**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP.197208262003121002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
(QS. Al-Baqarah (2): 188)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Rujito dan Ibunda Sumiyati tercinta yang telah membesarkan mengasuh serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga sampai saat ini serta do'a restu mereka berdua penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Terimakasih untuk Kakak-kakak dan adikku tercinta yang selalu memberikan dukungan serta motivasinya dan yang menjadi sumber inspirasiku yaitu Widodo, Rahayu, Winartik. Dan kedua kakak iparku Sawit, Dede Saputra. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Raharti dilahirkan di Bumi Agung pada tanggal 11 September 1997, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Rujito dan Ibu Sumiyati. Pendidikan di mulai dari SD Negeri 2 Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2010, Mts Nurul Iman Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat selesai tahun 2013, Ma Nurul Iman Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat selesai tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Pada Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017.

Bandar Lampung, 25 November 2021

Yang Membuat,

Raharti



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT dan segala syukur penulis panjatkan kepadanya-Nya atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan pengikut beliau yang telah membawa risalah agama Islam yang sampai pada saat ini masih menjadi panutan bagi umatnya samapai akhir zaman kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis sangat menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari penulisannya maupun dalam mengungkapkan pendapat dari para pakar bidangnya. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini yakni dengan membimbing, mengarahkan, memotivasi, memberikan saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama ungkapan terimakasih penulis kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I, Selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memberikan penghargaan dan juga bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Susiadi AS, M. Sos. I. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Jayus, M.H.I, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, khususnya Program Studi Hukum Tatanegara, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
7. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah berhenti dihaturkan disetiap sujudmu.
8. Teman-teman seperjuangan dari jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) tahun angkatan 2017, khususnya kelas C Hukum Tatanegara, terimakasih atas kebersamaan dan juga dukungannya selama ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan terjalin dengan baik.

Semoga segala bimbingan dan juga bantuan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dan dihitung sebagai amal ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan juga saran yang sifatnya membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya masyarakat umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, 25 November 2021

Penulis

Raharti
NPM. 1721020264

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengesahan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	4
H. Metode Penelitian.....	6
I. Sistematika penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perspektif Hukum Islam	9
1. Pengertian Fiqh siyasah	9
a. Pengertian Fiqh siyasah Dusturiyah	11
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah	13
c. Etika memilih pemimpin dalam Islam	
2. Pengertian suap (<i>Risywah</i>).....	15
a. Pengertian suap (<i>Risywah</i>).....	15
b. Unsur-unsur suap (<i>Risywah</i>).....	17
c. Bentuk-bentuk suap (<i>Risywah</i>).....	7
B. Perspektif Hukum Positif	19
1. Pengertian Politik Uang.....	19
2. Dasar Hukum Larangan Politik Uang.....	20
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Pekon Pajar Agung	22
B. Bentuk-bentuk Politik Uang	30
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang	31
D. Praktik Politik Uang dalam pemilihan Peratin.....	33
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Peratin	35
B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Praktik politik uang dalam Pemilihan Peratin.....	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	38
B. Rekomendasi	38
DAFTAR PUSTAKA	
39	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Turnitine
Lampiran 5	Blangko Konsultasi Skripsi

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk	30
1.2 Jenis Pekerjaan Penduduk	30



DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	30
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu: "Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)" yang sebagai berikut:

1. **Politik uang** adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai politik untuk mempengaruhi suara pemilih.¹
2. **Pemilihan Peratin** adalah suatu pemilihan Peratin secara langsung oleh warga pekon setempat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.² Sebutan adatnya kepala desa di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat disebut dengan "Peratin".
3. **Peratin** adalah pejabat pemerintah pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.³
4. **Perspektif** adalah konteks sistem dari persepsi visual melalui sudut pandang untuk melukiskan suatu objek atau masalah berdasarkan sifat atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.⁴
5. **Hukum Islam** adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan-aturan dan larangan bagi umat muslim.⁵
6. **Hukum positif** disebut juga dengan *ius constitutum* yang berarti asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan di tegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa politik uang dalam pemilihan Peratin perspektif hukum Islam dan hukum positif adalah suatu cara yang mempengaruhi pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam dua sudut pandang yakni yakni ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam hukum dikenal dengan kata *Fiqh* atau syari'at Islam, yang didalamnya mencakup tentang hukum-hukum dan batasan yang dibutuhkan masyarakat yang penerapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹ Kumolo Thahjo, *Politik Hukumi PILKADA Serentak*. (Bandung. PT Mizan Publika. 2015), 145.

² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon Pasal 42.

³ Ibid, Pasal 1 Ayat 19.

⁴ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81.

⁵ Faisal Abdoe, *Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lpas dan Rutan di Indonesia*. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

⁶ Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

Maka demi terlaksananya harapan tersebut sebagai insan yang berpendidikan dan bertanggung jawab terhadap hukum sudah mestinya harus membantu dengan melakukan pemberantasan terhadap pelaku-pelaku yang bertentangan dengan tujuan utama syari'at Islam.

Suap adalah politik uang (*money politic*). Adapun definisi dari politik uang itu merupakan memberikan sesuatu dengan niat untuk menarik simpati orang lain dengan maksud-maksud tertentu. Al-qur'an dan sesuai sabda Rasulullah menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang yang haram. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة: ١٨٨)

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*⁷(Q.S. Al-Baqarah:2:188)

Dan disebutkan pula dalam sebuah hadist ancaman bagi orang yang melakukan politik uang yang di riwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ⁸ (رواه ابو داود)

“Dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah Saw. telah melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap”. (HR Abu Dawud).

Adapun salah satu upaya mensejahterakan kehidupan manusia adalah memilih pemimpin yang adil dan bijaksana. Upaya ini telah dilakukan oleh masyarakat Pekon Pajar Agung dalam memilih Peratin.

Sebagaimana masyarakat lain, masyarakat Pekon Pajar Agung, mendambakan pelaksanaan pilkades yang murni, tulus dan berjalan sesuai dengan prosedur. Namun yang terjadi, para calon peratin berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara demi memenangkan pemilihan Peratin. Menarik simpati masyarakat itu lumrah, namun bila cara menarik simpati itu dilakukan dengan Politik uang akan merugikan masyarakat sendiri.

Politik uang dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian dalam bentuk apapun dari calon Peratin (calon kepala desa) kepada masyarakat sebagai pemilih dengan tujuan untuk mendapatkan banyak suara pada pemilihan. Dan juga dapat dimaknai sebagai sarana mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan imbalan materi dalam proses kontestasi kekuasaan.⁹

Politik uang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 29.

⁸ Sulayman, Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Daud, Juz II*, No. 3580, (Bayrut: Dar al Fikr, 2007), 324.

⁹ Iradhad Taqwa Sihidi, *Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 05. No. 02. 2019, 212.

pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi.

Terkait dengan sanksi pidana bagi calon peserta pemilihan yang melakukan politik uang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 149 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasar aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Dari deskripsi di atas nampak bahwa agama dan Undang-Undang telah melarang adanya *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya mempunyai sisi-sisi kesamaan yaitu demi kemaslahatan manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi sosio politik yang telah mempengaruhinya.

Namun pada kenyataannya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon, yang mana kasus *money politic* yang masih sering terjadi diakibatkan oleh persaingan antar calon Peratin. Oleh karena itu, untuk menggali lebih lanjut hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengulasnya dalam skripsi ini dengan judul: "Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)".

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan fokus penelitian ini yaitu, Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif “(Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”.

2. Sub Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian diatas, maka dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penelitiannya yaitu bagaimana Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Penelitian merumuskan Sub Fokus Penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Politik Uang dalam Pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Perspektif Hukum Islam.
- b. Politik Uang dalam Pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Perspektif Hukum Positif.

D. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena tersebut, maka diambil suatu rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat? Dan apa perbedaan dan kesamaan hukum tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dimaksud sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan kesadaran masyarakat tentang politik uang sehingga dapat tercipta demokrasi yang benar-benar jujur dan adil.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'īyyah*), fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penulis melihat ada yang membahas tentang politik uang seperti pada skripsi dibawah ini yaitu:

Skripsi karya Mukhsinin yang berjudul " Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum positif dan hukum islam di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak. Saran dari penelitian ini adalah sebagai warga negara yang baik dapat lebih mempunyai kesadaran atas bahaya politik uang dan bersama-sama mencegah terjadinya politik uang dalam memilih pemimpin ditingkat pusat maupun daerah, dansebaiknya mempunyai kesadaran tentang larangan politik uang dalam hukum positif dan hukum islam sehingga dapat memilih pemimpin yang bersih dan amanah.¹⁰

Skripsi karya Hasan Abdillah yang berjudul "*Money Politik* dalam Pilkades Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini

¹⁰ Mukhsinin, *Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, 125.

bertujuan untuk mengetahui sejauhmana batasan hukum atau tinjauan hukum islam terhadap tindak *Money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Tegal Ampel Bondowoso. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya kepercayaan diri seorang atau para calon kepala desa yang benar-benar memang layak untuk menjadi kepala desa, tetapi justru takut dikalahkan oleh calon lain yang tidak mempunyai potensi untuk menjadi kepala desa sehingga calon kepala desa yang layak tersebut melakukan praktik *money politic*.¹¹

Skripsi karya Rani Lakswi Bay yang berjudul " Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2013". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya Praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2013 dan untuk mengetahui perilaku politik calon kepala desa dan perilaku memilih masyarakat desa sidoluhur. Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan di setiap daerah atau desa yang akan mengadakan pemilihan calon kepala desa agar tidak terjadi kecurangan seperti *Money politik*.¹²

Skripsi karya Mat Supriansyah yang berjudul "*Money Politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-Undang terhadap *money politic* dikalangan masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi perilaku *money politic* yang dilakukan oleh caleg, dan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam pemilihan umum, untuk membenahi peraturan-peraturan mengenai pemilu, mengingat Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan pemilu.¹³

Jurnal karya Nadya Nurul Afifah yang berjudul "Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Di desa Gedungsari". Jurnal ini membahas tentang persepsi pemilih tentang praktik politik uang melalui indikator kognitif, efektif, interpretasi, dan evaluasi menunjukkan hasil negatif.¹⁴

Jurnal karya Dendy Lukmajati yang berjudul "Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014". Jurnal ini membahas tentang praktik-praktik politik uang yang tergolong dalam pemilu. Karena di dalam UU sudah diatur bahwa penyelenggaraan pemilu tidak diperbolehkan melakukan politik uang dalam mengumpulkan suara dari masyarakat.¹⁵

¹¹ Hasan Abdillah, *Money Politic dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, 59.

¹² Rani Lakswi Bay, *Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2013*, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 93.

¹³ Nadya Nurul Alifah, *Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gadungsari*, Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Surabaya, vol. 08 No. 02, 2020, 685.

¹⁴ Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, 76-76

¹⁵ Dendy Lukmajati, *Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014*, Jurnal Ilmiah POLITIKA, Vol. 07, No. 01, April 2016, 19.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tatacara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁶ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan proposal skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*), atau kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian yang kemudian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.¹⁷

Penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan fenomena yang terjadi di lapangan.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama atau yang diperoleh langsung dari sumber asli.¹⁹ Hasil tersebut biasanya melalui wawancara, observasi dan pendapat dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau orang yang dijadikan narasumber

b. Data Sekunder

Data sekunder yang menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini yaitu berupa:

- 1) Data primer terdiri dari data yang di peroleh dari buku-buku teori fiqh siyasah, buku-buku hukum positif, dan jurnal hasil penelitian.
- 2) Data sekunder terdiri dari ensiklopedia, kamus, majalah, koran, dan situs webdite online.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Populasi dalam penelitian ini seluruh masyarakat Pekon Pajar Agung dengan jumlah adalaha 1327 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah atau yang akan mewakili dari populasi. Dalam menentukan berapa sampel maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yaitu, peneliti menentukan sendiri siapa orang yang akan dijadikan sampel berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini

¹⁶Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 21

¹⁷Muhtadi dkk, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia. 2003), 310.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), 310

¹⁹Syarifuddin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

berjumlah 10 orang yang terlibat dalam pemilihan pertama 2 orang Calon Peratin, 2 orang panitia, 2 orang tim sukses, 4 orang pemilih sebagai tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat pekon setempat.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu:

a. Metode interview (wawancara)

Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwewenang tentang suatu masalah.²⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang di tujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.²¹ Dokumen adalah catatan-catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan-pertanyaan tertulis disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

5. Pengolahan Data

Data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian lapangan ataupun dari literatur.²²
- b. Rekontruksi data, (*Recontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematika data (*Systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

6. Metode Analisa Data

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kompratif yaitu metode yang bertujuan untuk membandingkan satu buah fenomena dengan fenomena yang lain, atau membandingkan fenomena yang sama pada kelompok subjek yang berbeda.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari penegertian dan dasar-dasar yang bersifat umum yang kemudian dicari yang bersifat khusus.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum ke khusus. Metode ini akan dipergunakan untuk menyaring dan

²⁰Ibid., 231.

²¹Joko, Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 102.

²²Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Bandung: PT. Grafindo Persada, 2020), 56.

²³Amirullah Zainal Abidin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang dimana setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

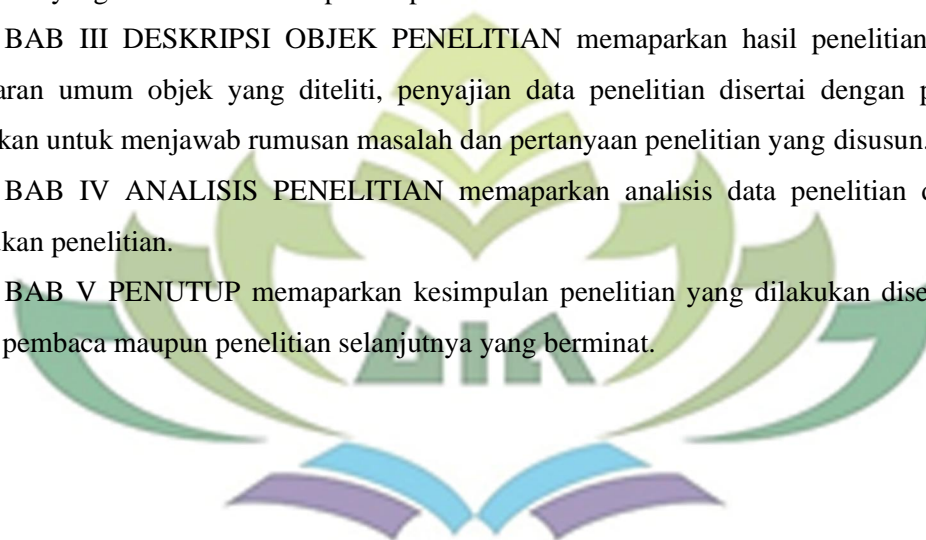
BAB I PENDAHULUAN memaparkan pengesahan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode yang dilakukan dalam penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI memaparkan landasan teori untuk menggambarkan posisi penelitian yang dilakukan terhadap hasil penelitian lain.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, gambaran umum objek yang diteliti, penyajian data penelitian disertai dengan pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang disusun.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN memaparkan analisis data penelitian dan temuan yang dilakukan penelitian.

BAB V PENUTUP memaparkan kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan saran untuk pembaca maupun penelitian selanjutnya yang berminat.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqahā-yafqāhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam".¹ *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²

Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di perbolehkan dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'ān dan sunnah).³

Kata *siyāsah* yang bersal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Siyāsah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyāsah secara terminologis, Abdul Wahāb Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberi batasan *siyāsah* adalah " membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.adapun Ibn Manzbur mendefinisikan *siyāsah* "mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Dari uraian tentang *Fiqh* dan *Siyāsah* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

a. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Siyāsah Dusturiyah adalah bagian *fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut.

Disamping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam *Siyāsah Syar'iyyah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam *Fiqh Siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.

¹Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

²Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

³Ibid, 22.

Kata "*Dustur*" berasal dari bahasa persia, semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Di dalam pembahasan *Syari'ah* digunakan istilah *Fiqh Dusturiy*, yang dimaksud dengan *Dusturiy*, adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peratur-peraturannya dan adat istiadatnya. Abu A'lā al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.⁴

Dengan demikian, *Siyāsah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang di sebutkan dalam al-Qur'ān dan yang di jelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁵

Hal-hal diataslah *Siyāsah Dusturiyyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.⁶

J.Suyuti Pulungan dalam bukunya mengartikan *Siyāsah Dusturiyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁷

Dalam kaitannya dengan persoalan *fiqh siyāsah dusturiyah* umumnya tidak dapat terlepas dari dua unsur pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli (dalil yang mempunyai sifat keseluruhan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukallaf.

Baik ayat-ayat al-Qur'ān maupun al-hādīst, *maqāshid syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua,

⁴Imam Amrusi Jailani, **et. al.** *Hukum Tata Negara Islam.*, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2014), 22.

⁵ Ibid

⁶ Ibid., 23.

⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁸

b. Ruang lingkup *fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, terdapat ihtilaf dari para ulama. Namun perbedaan ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sudut pandang masing-masing ulama, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing.

Diantaranya adalah klasifikasi *fiqh siyāsah* secara menyeluruh, yang disimpulkan oleh Imām al-Māwardi dalam kitab *Ahkām al-Sulthāniyyah*, dirinya memberikan penjelasan bahwa *fiqh siyāsah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya: *siyāsah dusturiyyah* (perundangan), *siyāsah māliyyah* (keuangan), *siyāsah qāda'iyyah* (peradilan), *siyāsah harbiyyah* (peperangan), dan *siyāsah idāriyyah* (administrasi).

Dari beberapa ruang lingkup *fiqh siyāsah* diatas, maka menurut Iqbal dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian kelompok, antara lain:

1) *Siyāsah Dusturiyyah*

Politik Perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *al-Tasyrī'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *al-Qāda'iyyah* oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau *al-Idāriyyah* oleh eksekutif.

2) *Siyāsah Dāuliyyah*

Politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyāsah harbiyyah* yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang dengenjatan senjata.

3) *Siyāsah Māliyyah*

Politik keuangan dan moneter yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak politik, pajak dan perbankan.

Dengan demikian, *fiqh siyāsah dusturiyyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsi-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang di sebutkan dalam al-Qur'ān dan yang di jelaskan sunnh Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Hal-hal diataslah *Siyāsah Dusturiyyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang secara spesifik lingkup pembahasannya

⁸Ahmad Djajuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47-48.

mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Selain itu juga berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Selain itu pembahasan mengenai *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* menurut beberapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat bahwa *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* terbagi sebagai berikut:

a) Bidang *Siyāsah Tasri'iyah*

Pembahasan terkait dengan *siyāsah* ini adalah persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd* (majelis shuro), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah.

b) Bidang *Siyāsah Tanfidhiyyah*

Pembahasan terkait dengan *siyāsah* ini adalah meliputi pembahasan tentang *imāmah* persoalan *bai'ah*, *wuzarah* dan *waliy al-ahdi*.

c) Bidang *Siyāsah Qadā'iyyah*

Pembahasan terkait dengan *siyāsah* ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan.

d) Bidang *Siyāsah Idāriyyah*

Pembahasan terkait dengan *siyāsah* ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada Negara, hal ini disebabkan oleh:

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.⁹ Sedangkan para *fuqaha*/ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikan kepada hal-hal praktis.
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- 3) Kalau *fuqaha* lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).¹⁰

⁹ Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Alumni, (Bandung.: 1971), 157.

¹⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, Jakarta, Kencana, 2004, 49.

- 4) Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepada negara, oleh karena itu logis sekali apabila para *fuqaha* memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainnya.¹¹
- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.¹²

Walaupun demikian, ada juga diantara *fuqaha* dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-fārabi, Ibnū sina, Al-māwardi, Al-gāzali, Ibnū rasydi, dan Khaldun.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa indonesia tidaklah mustahil dari kata *dustur*.

Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan adan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

c. Etika memilih pemimpin dalam Islam

Pemimpin adalah faktor penting dalam kehidupan berkelompok, berorganisasi bahkan bernegara. Jika pemimpin itu jujur, baik, cerdas dan amanah, niscaya anggota atau rakyatnya akan makmur. Sebaliknya jika pemimpinnya tidak jujur, korupsi, serta menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara.

Oleh karena itulah Islam memeberikan tatacara dalam memilih pemimpin yang baik, di antaranya:

1) Memilih pemimpin yang baik dan beriman

Pemimpin yang baik dan beriman yakni yang memiliki akhlak mulia dan aqidah yang sma atau dari golongan kita, dan ini akan memperkuat dan dapat menjadi penolong bagi kaumnya sendiri. Sebagaimana firman Allah:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (سورة المائدة: ١٣٨-١٣٩)

“Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat sisaan yang pedih, yaitu orang-orang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka

¹¹ Ibid., 49.

¹² Wirjonno Projodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung, PT.Eresco, 1971, 17-18.

*sesungguhnya orang itu termasuk golongan neraka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.*¹³ (Q.S An-Nisa’: 138-139)

2) Memilih yang paling pantas

Memilih pemimpin dalam Islam harus yang memiliki kemampuan dan keahlian, sehingga dianggap layak atau pantas baginya menerima amanah tersebut. Dalil etika ini adalah bahwa ketika Nabi menaklukkan Makkah dan menerima kunci ka’bah dari bani syaibah, al-Abbas, pamannya, memintanya agar menyatukan untuknya tugas memberi minum jamaah haji sekaligus juru pintu baitullah.

3) Memilih yang lebih berkompeten di bidangnya

Etika ini merupakan penyempurnaan dari etika pertama. maksudnya, jika seseorang hendak memilih orang yang bisa mempresentasikan di bidangnya, sementara tidak dijumpai ada orang yang paling pantas di bidang tersebut, maka ia harus memilih orang yang lebih berkompetensi pada yang lainnya. Dengan kata lain, ia memperhatikan orang yang lebih banyak keshalihan dan kekuatannya. Hal itu dengan ijtihadnya, maka ia telah menunaikan amanah. Allah tidak membebani lebih dari itu, karena hal itu berada di luar kesanggupannya. Allah berfirman dalam

Seandainya tidak terdapat pemimpin yang paling pantas untuk memegang jabatan itu, maka memilih yang lebih mendekati kepantasan untuk tiap-tiap jabatan sesuai kemampuannya. Akan tetapi, kita punya kewajiban untuk mengawasi dan menasehatinya serta mengarahkannya dengan arahan yang baik. Bukan berarti ia mengangkatnya lalu membiarkannya. Sebab ia bukan ahlinya, dan ia hanyalah diangkat sebagai pemimpin karena dipaksa.¹⁴

4) Memilih karena faktor kekuatan dan amanah

Saat ini kecenderungan seorang pemimpin dapat dilihat hanya memiliki “sebelah kaki”, kuat tanpa amanah atau amanah tanpa kekuatan. Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan hal ini bisa disaksikan hingga masa kita dewasa ini. Misalnya, orang yang tidak layak memegang suatu jabatan dari segi amanahnya, namun anda melihatnya memiliki semangat, kekuatan dan keuletan dalam pekerjaan. Sebaiknya anda melihat orang amanah tapi tidak memiliki semua itu, anda mendapati orang-orang yang menjadi pemimpin rakyat memilih jenis orang pertama untuk melaksanakan pekerjaan mereka meskipun ia tidak amanah.¹⁵

Imam Ahmad pernah ditanya tentang dua orang yang akan menjadi panglima dalam perang, salah satunya adalah orang yang kuat tapi *fasiq*, dan lainnya *shalih* tapi lemah. Siapakah di antara keduanya yang ditunjuk sebagai panglima?, ia menjawab, orang *fasiq* tapi kuat, maka kekuatannya untuk kaum muslimin dan kedurhakaanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang *shalih* tapi lemah, maka *keshalihannya* untuk dirinya sendiri dan

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 100.

¹⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Abdurrahman al-Jihan, *Al-qawa'id asy-syar'iyah li Ikhtiyar an-na'ib*, terjemahan, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2009), 64.

¹⁵ Syikh Ibnu Utsaimin, *Syarh as-Siyasah asy-Syar'iyah*, 47.

kelemahannya merugikan kaum muslimin. Jadi perang dilakukan bersama orang yang kuat meski pun durhaka. Nabi SAW bersabda yang artinya:

“sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang yang durhaka”

5) Memilih pemimpin yang mampu berlaku adil

Seseorang pemimpin dituntut harus mampu berlaku adil, keadilan yang diserukan Al-Qur'an pada dasarnya mencakup keadilan dibidang ekonomi, sosial dan terlebih lagi dalam bidang hukum. Seorang pemimpin yang adil, indikasinya adalah selalu menegakkan supremasi hukum, memandang dan memperlakukan semua manusia sama di depan hukum tanpa pandangan bulu.

Hal inilah yang telah diperintahkan Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah ketika bertekad untuk menegakkan hukum (dalam konteks pencurian), walaupun pelakunya adalah putri beliau sendiri (Fatimah Az-Zahra). Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 (سورة المائدة: ٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu, untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takw. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁶ (Q.S Al-Maidah:8)

2. Pengertian suap (Risywah)

a. Pengertian suap (risywah)

Risywah berasal dari bahasa arab, yang berarti *memasang tali, mengambil hati*.¹⁷ Istilah lain yang seperti dan biasa dipakai dikalangan masyarakat adalah "suap". *Risywah* atau sogok merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Dengan kata lain juga *risywah* ialah pemberian apa saja berupa uang atau yang lain kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan agar memutuskan perkara atau menangguhkannya sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang zalim.¹⁸

Risywah menurut para ulama dan ahli bahasa dalam kamus Al Misbāhul Munir dan Kitab Al-Mūhalla Ibnū Hazm adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).¹⁹

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 108.

¹⁷ Yunus Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Handika Agung, 1989), 142.

¹⁸ Hepi Riza Zen, *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, “Jurnal Al-adalah, Bandar Lampung: Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Vol. XII, No. 3, Juni 2015”, 533.

¹⁹ Ahmad Rahman, *Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 63.

Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa pengertian suap (*Risywah*) seperti berikut ini:

- 1) Suap adalah pemberian terhadap seorang pejabat dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa terealisasi sekalipun melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. Suap semacam ini haram hukumnya, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika pemberian ini dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada di pihak yang benar, maka pemberian itu hanya haram bagi yang menerima.
- 2) Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. maksudnya adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.
- 3) Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah seseorang telah meminta pertolongan berdasarkan kesepakatan. Definisi ini kurang umum karena tidak mencakup definisi suap yang tanpa kesepakatan. Definisi ini juga tidak mencegah adanya semacam pemberian yang sebetulnya tidak termasuk suap, seperti misalnya sedekah. Karena sedekah kadang diberikan setelah ada yang memintanya.
- 4) Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi sesuatu yang hak menjadi yang batil dan yang batil menjadi yang hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi di tolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'.
- 5) Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi sesuatu kedudukan agar berbuat dzalim. Dengan kata lain sesuatu yang diberikan oleh si penyuap kepada seseorang dengan tujuan agar penyuap mendapat pertolongan dengan hukum batil dari masalah yang hak atau agar mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya.
- 6) Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Definisi ini menjelaskan suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun dengan cara batil.²⁰

Firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة: ١٨٨)

²⁰ Abdul, Muhsin Abdullah, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 9.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²¹(Q.S Al-Baqarah: 188)

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.²²

Rasulullah SAW juga menjelaskan ancaman bagi orang yang berbuat suap-menyuap (*risywah*) dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ²³ (رواه ابو داود)

“Dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah Saw. telah melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap”. (HR Abu Dawud)

Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi sesuatu yang hak menjadi yang batil dan yang batil menjadi yang hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi di tolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Berdasarkan hadist diatas bahwasannya suap-menyuap merupakan suatu dosa besar, karena pemberi dan penerima suap di ancam Rasulullah SAW. Dengan laknat atau ancaman dari Allah itu merupakan terusirnya terjauhnya dari rahmat Allah.

b. Unsur-unsur suap (*Risywah*)

Unsur-unsur suap sebagai berikut:

- 1) Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- 2) Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
- 3) Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.

c. Bentuk-bentuk suap (*Risywah*)

Didalam hal suap menyuap terdapat beberapa bentuk, sebagai berikut:

- 1) Suap untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya

Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh syara', karena hak itu kekal dan batil itu sirna.

Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang

²¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 29.

²² Kaltsun, Lilik Ummu ddk, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015), 63.

²³ Sulayman, Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz II*, No. 3580, (Bayrut: Dar al Fikr, 2007),

mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya.

Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil diharamkan dalam Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu, penyuap dan penerima suap.

Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari seseorang dengan cara yang menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu yang terlarang didapatkannya. Seperti misalnya, seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena alasan-alasan berikut ini:

- a) Ia mengambil harta itu sarana melakukan kebatilan.
- b) Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara qath'I diharamkan.

2) Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat baik. Akan tetapi, kadangkala manusia khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup orang lain sehingga orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Akhirnya untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya terpaksa harus menyuap. Suap-menyuap dalam hal ini, diperbolehkan. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya.

Menurut jumhur ulama, untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang menerima suap. Termasuk juga seseorang yang diperbolehkan menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri. Hal ini tidak termasuk suap karena Allah SWT berfirman Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (سورة البقرة: ٢٨٦)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak

sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir".²⁴ (Q.S Al-Baqarah: 286)

3) Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan

Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan, oleh karena itu, kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang.

Cara ini jelas diharamkan oleh Allah SWT. Semakin tinggi kedudukan yang diraih, semakin besar pula dosa yang ditanggungnya. Keharaman cara ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة النساء: ٥٨)

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".²⁵ (Q.S. An-Nisa': 58)

Dari beberapa bentuk suap (*Risywah*) diatas, maka pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kec. Belalau Kab. Lampung Barat termasuk kedalam poin no (c) yaitu suap dalam memperoleh jabatan atau pekerjaan.

B. Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Politik Uang (*Money Politic*)

Money Politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.²⁶ Politik uang yaitu pertukaran sejumlah uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.²⁷

Politik uang (*Money Politic*) dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada juga yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan umum suatu negara.

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta

²⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 49.

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 87.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 65.

²⁷ Ismawan, Indra. *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), 155.

tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.²⁸

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

Maka politik uang (*Money Politic*) adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

2. Dasar Larangan Pokitik Politik Uang (*money politic*)

Sejarah keberlangsungan pemilihan kepala desa langsung tidak bisa dilepaskan dari aturan perundang-undangan yang ada. Diantaranya pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam BAB XI pasal 95 terkait pemerintahan desa disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
- b. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- c. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Bunyi ayat-ayat dalam pasal di atas menjadi bagian terpenting bahwa pemilihan peratin (pilkades) secara langsung memiliki legalitasnya. Terkecuali daripada itu, pembacaan terhadap pasal ini mengindikasikan bahwa pemilihan peratin (pilkades) merupakan bagian dari pemerintahan desa disamping perwujudan perangkat desa.²⁹

Fenomena politik uang tersebut tidak hanya terjadi pada pemilihan umum ditingkat pusat maupun tingkat daerah saja tetapi juga terjadi pada tingkat pemilihan kepala desa. Secara umum politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum. Politik uang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi.

²⁸Kumolo, Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung: PT Mirza Publika, 2015), 145.

²⁹ Umarwan Sutopo, *Pilkades Langsung dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*, e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, Vol. 2, No. 2, 2020, 186.

Terkait dengan sanksi pidana bagi calon peserta pemilihan yang melakukan politik uang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 149 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 3) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarakan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 4) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Artinya berdasarkan dalam KUHP, pemilih dan yang dipilih mendapatkan sanksi penjara atau denda yang sama jika terbukti melakukan politik uang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2015.

Hadist

Sulayman, Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, No. 3580, Bayrut: Dar al Fikr, 2007.

Buku

- Abdul, Muhsin Abdullah, *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abidin, Zainal Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Astawa, Pantja, Gede, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung:PT. Alumni, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djajuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Bandung: PT. Grafindo Persada, 2020.
- Iqbal, Muhammad, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Ismawan, Indra, *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Kaltsum, Lilik Ummu ddk, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: UIN Press, 2015.
- Muhtadi dkk, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Projodikoro, Wirjonno, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung, PT.Eresco, 1971.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahman, Ahmad, *Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sanusi, Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004..
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Thahjo, Kumolo, *Politik Hukumi PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, 2015.
- Yunus Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Handika Agung, 1989.
- Muchtar, Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni, 1971.
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Abdurrahman al-Jihan, *Al-Qawa'id Asy-Syar'iyah li Ikhtiyar Annaib*, Terjemahan, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2009.
- Riswandi, *Profil Desa dan Kelurahan Pajar Agung*, Lampung Barat: 2020.
- Haris, Syamsuddin. *Demoikrasi Desa*, Kertas Kerjaan LIPI, 2004.
- ### Wawancara
- Amirullah, Wawancara dengan Masyarakat Pekon Pajar Agung, Lampung Barat, 23 April 2021.
- Andre, Wawancara dengan Masyarakat dan Tim Sukses dalam PemilihanPekon Pajar Agung, Lampung Barat, 19 April 2021.
- Anwar, Wawancara dengan Jurnalis Pekon Pajar Agung, Lampung Barat 20 April 2021.
- Baihaqi, Wawancara dengan Masyarakat Pekon Pajar Agung, Lampung Barat, 22 April 2021.

- Catur, Wawancara dengan Masyarakat dan Panitia Pemilihan Pekon Pajar Agung, Lampung Barat, 17 April 2021
- Retno, Wawancara dengan Masyarakat Pekon Pajar Agung, Lampung Barat, 22 April 2021.
- Rizky, Wawancara dengan Masyarakat dan Panitia Pemilihan Pekon Pajar Agung, Lampung Barat, 17 April 2021.
- Rudi, Wawancara dengan Masyarakat Pekon Pajar Agung, Lampung Barat, 22 April 2021.
- Sapit Alpian, Wawancara dengan Peratin Pekon Pajar Agung, Lampung Barat, 16 April 2021.
- Yulius, Wawancara dengan Masyarakat dan Tim Sukses Dalam Pemilihan Peratin Pekon Pajar Agung, Lampung Barat, 19 April 2021.

Skripsi

- Abdoe, Faisal. 2019, *Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Abdillah, Hasan. 2009, *Money Politic dalam Pilkada di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Supriansyah, Mat. 2017, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Mukhsinin. 2018, *Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Bay, Lakswi, Rani. 2017, *Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2013*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang).
- Imam Amrusi Jailani, 2014, **et. al.** *Hukum Tata Negara Islam.*, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press).

Jurnal

- Alifah, Nurul, Nadya, *Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gadungsari*, Vol 08 No. 02, Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Surabaya, 2020.
- Hariyantati, Runi, *Etika Politik dalam Negara Demokrasi*, Vol. II No. 1 *Jurnal Demokrasi*, 2003.
- Irawan, Dedi. *Studi Tentang Politik Uang (Money Politik) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus di Kelurahan Sempoja Selatan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015).
- Lukmajati, Dendy, *Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014*, Vol. 07, No. 01, Jurnal Ilmiah POLITIKA, 2016.
- Nail, Hoiru, Muhammad, *Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*, Vol. 05. No. 02, Jurnal Yuridis Universitas Jember, 2018.
- Sihidi, Taqwa, Iradhad, *Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia*, Vol. 05. No. 02, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Sutopo, Umarwan, *Pilkades Langsung dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*, Vol. 2, No. 2, 2020. "e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies, Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2020.
- Zen, Riza, Hepi, *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015 "Jurnal Al-adalah, Bandar Lampung: Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon